

Analisis Kinerja Anggaran Dengan Metode *Value For Money* Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa

Zulkifli Bokiu¹, Mahdalena², Amir Lukum³

¹Jurusan Akuntansi, Univeristas Negeri Gorontalo

²Jurusan Akuntansi, Univeristas Negeri Gorontalo

³Jurusan Akuntansi, Univeristas Negeri Gorontalo

Abstrak

Dana desa yang digulirkan tiap tahun ke pemerintah desa di tahapan pelaksanaan lapangan masih menuai masalah khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Perencanaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di beberapa desa belum mengangkat tentang potensi yang dimiliki desa sehingga anggaran yang dibuat kurang tepat pada sasaran pemberdayaan sehingga menjadi tantangan dalam mengupayakan perencanaan anggaran berbasis pada kinerja (*value for money*). Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis penerapan dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, dan 2) Menguraikan anggaran pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan efisien dan efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian di Desa Tolotio Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango. Sumber data adalah data primer melalui wawancara mendalam ke aparat desa, masyarakat dan pemerintah kabupaten Bone bolango. Data sekunder berupa laporan realisasi/capaian dari dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan anggaran pemberdayaan masyarakat desa telah memenuhi syarat secara ekonomi, efisien dan efektif berdasarkan rasio yang di peroleh dari anggaran dan realisasinya. Sementara hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diusulkan belum memberikan dampak terhadap peningkatan keterampilan maupun pendapatan masyarakat.

Keywords: Kinerja Anggaran, Pemberdayaan Masyarakat, *Value For Money*

Copyright (c) 2023 **Amir Lukum**

✉ Corresponding author : Amir Lukum

Email Address : amirlukum@ung.ac.id (Gorontalo)

PENDAHULUAN

Kebijakan program pengelolaan dana desa yang dicetuskan pemerintah pusat sebagai bantuan pendanaan ke desa-desa di wilayah Republik Indonesia adalah sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan kemandirian desa. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang No 6.Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan penuh kepada desa sebagai *self governing community* dan *self local government* yang luas. Khusus pada penyelenggaraannya, UU tersebut memberi kewenangan Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sebagai pelaksana pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kehadiran UU ini telah membuka khasanah berpikir masyarakat secara umum yang sebelumnya menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang kurang mandiri beralih pada entitas yang sejahtera dan demokratis.

Dana desa yang digulirkan merupakan bagian dana yang bersumber dari APBN yang penyalurannya melalui APBD ke rekening pemerintah desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Secara konteks, dalam pelaksanaan anggaran memiliki indikator untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan anggaran. Salah satu indikator pencapaian kinerja yang digunakan pada lingkup sektor publik adalah *value for money* yang mengukur manfaat perolehan barang dan jasa dari setiap alokasi dana (LAN dan BPKP; 2000).

Sementara dalam penyusunan anggaran pemerintah pencapaian kinerja termasuk pemerintah desa masih menggunakan metode tradisional yang lebih fokus pada kebutuhan belanja dengan cara menambah atau mengurangi jumlah anggaran tahun lalu dan kinerja pelaksanaan diukur berdasarkan pada serapan dan realisasi anggaran saja. Tabel dibawah ini menggambarkan jenis kegiatan dan capaian prnggunaan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat yang dibelanjakan dalam kurun waktu tiga tahun.

Tabel 1. Belanja Untuk Pemberdayaan Masyarakat desa Tolotio Tahun 2020-2022

No	Pemberdayaan Masyarakat 2020	Realisasi (rupiah)	Capaian %
1	Pembangunan kolam perikanan darat	183.971.250	100
2	Pembangunan pelabuhan perikanan kecil	5.000.000	100
3	Pembangunan sarana prasarana umkm serta koperasi	23.865.509	90
	Jumlah	212.836.759	
	Pemberdayaan masyarakat 2021		
1	Bantuan perikanan (bibit dan pakan)	213.750.000	100
2	Penigkatan ketahanan pangan	130.257.500	86
3	Peningkatan kapasitas kepala desa	7.500.000	75
4	Peningkatan kapasitas perangkat desa	14.000.000	49
5	Peningkatan kapasitas BPD	7.500.000	75
	Jumlah	373.007.500	
	Pemberdayaan masyarakat 2022		
1	Pembangunan kolam perikanan darat	112.271.300	86
2	Peningkatan produksi tanaman pangan	77.941.800	94
	Jumlah	190.213.100	

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bone Bolango

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jenis belanja yang dialokasikan tiap tahun tidak konsisten penggunaannya terutama pada sasaran masyarakat yang diberdayakan. Jenis belanja tidak fokus pada potensi desa yang perlu mendapat perhatian dan terkesan dipaksakan untuk menyiasati penggunaan sisa anggaran lebih yang belum digunakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai manfaat sebagai gambaran kinerja anggaraan dana desa terutama pada pelaksanaan pemberdayaan desa belum terlaksana secara optimal.

Secara khusus, pemberdayaan masyarakat ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas perekonomian. Sehingga salah satu item alokasi dana desa menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian alokasi tersebut. Tentunya hal ini untuk menunjang peningkatan derajat kehidupan masyarakat desa. Memang dalam penyaluran dana desa tidak terdapat masalah sebagaimana klaim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa secara kuantitatif maupun

kualitatif masyarakat desa telah merasakan manfaat besar dari penyaluran dana tersebut (kemenkeu.go.id). Faktanya, penggunaan dana desa kurang fokus pada skala prioritas dan produk unggulan desa sebagaimana yang dituturkan salah satu pejabat di kabupaten Bonebolango. Masyarakat hanya sekedar diberikan pelatihan, pemberian bantuan peralatan bahkan pendanaan sekedar sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas penggunaan dana. Sama sekali kurang menyentuh pada upaya keberlanjutan program. Sehingga pada fase selanjutnya keputusan anggaran dan kontrol kinerja anggaran belum menyentuh pada aspek ekonomi, efisien dan efektivitas program sebagaimana yang tertuang secara konsep pada *value for money* yang melihat kesesuaian manfaat maksimum atau output dari penggunaan input yang rendah (Ridwan dan Anggrawati; 2017).

Penelitian ini termotivasi pada observasi awal peneliti di wilayah pesisir kecamatan Bonepantai. Sebagian besar penduduk wilayah ini berpenghasilan sebagai nelayan. Salah satu desa yang menjadi pengamatan kami adalah desa Tolotio. Secara geografis desa Tolotio memiliki sumber daya alam terbesar dari sektor maritim. Potensi alam dari hasil laut seharusnya memberi kontribusi signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam penyusunan perencanaan dana desa lebih mengutamakan pada potensi hasil alam yang dapat dikelola melalui pemberdayaan masyarakat desa. Memang persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir tidak dapat disandingkan dengan sektor lainnya. Dalam hal ini desa Tolotio memiliki potensi yang baik untuk meningkatkan potensi kelautan karena sarana dan prasarana yang dimiliki sebagian besar sudah dimanfaatkan bagi penduduk setempat. Namun dalam konteks pemberdayaan masyarakat persoalannya adalah kurangnya pemahaman dalam penyusunan perencanaan program yang digunakan dari anggaran dana desa. Penuturan kepala desa setempat bahwa permasalahan yang dihadapi beberapa kelompok usaha (pertanian, peternakan, perdagangan) yang memerlukan pendampingan adalah kurang sesuai karena tidak didasarkan pada potensi desa terbesar (hasil laut) sehingga program pemberdayaan masyarakat selayaknya diarahkan ke pemanfaatan hasil laut justeru diarahkan ke bidang lainnya. Akibatnya, banyak sisa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dialihkan ke kegiatan lain untuk menutupi anggaran tersebut. Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran negara untuk dana desa. Penyusunan perencanaan anggaran hanya bersandar pada pengulangan kegiatan sebelumnya bukan difokuskan pada keberlanjutan program. Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam penggunaan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Bedasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan Bagaimana penerapan dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat serta Apakah kinerja anggaran untuk pemberdayaan masyarakat telah efisien dan efektif. Berdasarkan pada rumusan penelitian, maka tujuan penelitian adalah Menganalisis penerapan dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat serta Menguraikan anggaran pemberdayaan masyarakat dengan *value for money*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji secara mendalam anggaran yang dialokasikan dan dimanfaatkan pada pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana desa. Dalam mengkaji kondisi pada objek penelitian terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengeksplorasi hal yang menjadi pokok masalah sehingga akan dicari solusi. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir tepatnya di desa Tolotio Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari masyarakat setempat yang memperoleh bantuan bersumber dari dana desa yang disalurkan dari bidang pemberdayaan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami secara objektif dan mendalam bagaimana perilaku mereka sebagai pelaku yang bersentuhan langsung dengan usaha yang mereka jalankan. Selain data dari masyarakat, peneliti juga memperoleh data langsung dari aparat desa, petugas di dinas pemberdayaan dan pemerintah desa Kabupaten Bonebolango untuk melakukan *cross check* data di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk gambaran umum desa, laporan dana desa bidang pemberdayaan dari pemerintah desa dan alokasi dana desa dari dinas pemberdayaan dan pemerintah desa kabupaten Bonebolango, buku teks, artikel, beberapa jurnal dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prijono dan Pranarka (2006) memandang pemberdayaan memiliki arti memberikan kuasa atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai pihak yang memberikan kemampuan atau keberdayaan yang lahir dari ketidakberpihakan pada rakyat sebagai kaum mayoritas. Kondisi ini memicu terciptanya keinginan untuk menumbuhkan kemampuan seseorang dengan memberikan pengalaman psikologis sehingga orang tersebut merasa berdaya. Chambers (1999) memandang dalam pemberdayaan terkandung konsep peningkatan motivasi dan tanggung jawab sebagai bentuk aktualisasi diri karena terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan.

Merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya dari urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk ini maka perlu menyelaraskan antara potensi yang dimiliki desa agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya potensi alam Desa Tolotio yang didominasi hasil laut dan pertanian perlu dikembangkan. Pengembangan atas potensi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang andal dalam mengelola potensi alam yang dimiliki. Maka masyarakat yang berada pada tingkat pendidikan rata-rata hanya menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat SMP perlu ditingkatkan pengetahuannya dengan mengikutsertakan pada program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berangkat dari asumsi bahwa setiap individu atau masyarakat punya potensi yang dapat dikembangkan. Asumsi ini menjadi dasar

diletakkan bidang pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pada dana desa terdapat empat bidang yang dibelanjakan. Pertama, adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan; kedua, bidang pelaksanaan pembangunan; ketiga, bidang pelaksanaan kemasyarakatan; keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Khusus untuk bidang pemberdayaan masyarakat, Desa Tolotio dalam merancang program pemberdayaan masyarakat, diawali dengan menampung aspirasi masyarakat dari masing-masing dusun. Hal ini penting dilakukan agar dapat teridentifikasi potensi desa yang biasanya berasal dari komunitas setempat sehingga digunakan sebagai landasan dalam merancang program yang efektif dan berkelanjutan.

Terkait hal ini saat peneliti melakukan wawancara, pernyataan yang disampaikan kepala desa:

“Kalo disini masing – masing dusun memberikan masukan tentang penyediaan sarana dan prasarana yang diinginkan. Selanjutnya usulan mereka dibawa oleh kepala – kepala dusun pada pertemuan di desa. biasanya kami memasukkan usulan itu ke ketahanan pangan karena untuk tahun ini yang sementara jalan adalah kolam ikan nila dan peternakan kambing”

Memang, pada dasarnya konsep pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat. Sehingga pernyataan di atas memberi gambaran bahwa dalam proses perancangan program berupaya mengakomodir usulan program dari masyarakat desa. Kolam ikan nila dan ternak kambing sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa di atas merupakan program dari sekian program yang diusulkan bidang pemberdayaan masyarakat.

Meski demikian tampaknya harapan pada peningkatan kapasitas masyarakat kurang bersesuaian dengan realita yang peneliti lihat di lapangan. Saat peneliti melakukan observasi/peninjauan langsung ke kolam pemeliharaan ikan nila, tampak belum terkelola dengan maksimal. Salah seorang petugas kolam saat peneliti menanyakan apakah kerap dilakukan pendampingan dari dinas terkait. Petugas tersebut menjawab :

“pernah ada yang datang kesini bakase tunjuk cara pemberian pelet dan obat-obatan untuk ikan. Tapi itu Cuma satu kali. Abis itu so tidak pernah. Ini ikan yang ada piara juga belum ada depe hasil. Sebenarnya boleh mo cepat besar dorang (ikan). Cuma karena air yang mo pake akan baganti air di kolam susah. Nanti mo ambil air di sumber sebelah (sambal menunjuk banyak ikan mati yang dikumpul diluar kolam)”

Pernyataan ini memberi gambaran bahwa di dalam merancang program memerlukan perencanaan yang matang. Beberapa hal yang diperlukan adalah melakukan analisis kebutuhan, memiliki tujuan yang jelas, pendekatan yang holistik. kolaborasi, keberlanjutan, pemantauan dan evaluasi (Kuswandoro, 2016; Fatimah, 2016).

Saat peneliti melakukan konfirmasi terkait hal di atas ke dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bone Bolango, salah seorang karyawan (tidak ingin disebut namanya) menyampaikan :

“untuk masalah pendamping desa sering dilakukan. Bahkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa banyak. Misalnya pemberian bibit, peralatan mesin tani. Cuma masalahnya kalau bibit dan mesin tani ini apakah diperlukan di desa itu yang lebih banyak nelayan. Kami juga sering merekrut untuk tenaga pendamping, tapi

ya itu lagi bu, kalau kami mengarahkan ke mereka nanti kesannya kami intervensi. Jadi kami hanya bisa menampung apa yang menjadi usulan mereka”.

Dari kedua pernyataan diatas dan pengamatan kami secara langsung di lokasi terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala tersebut antara lain: terbatasnya tenaga dalam mengelola kolam pemeliharaan ikan, pasokan makanan/pelet ikan yang tidak rutin, sulitnya pasokan air yang digunakan untuk mengganti air di kolam, kurangnya pendamping dari dinas terkait, dan terbatasnya ketersediaan penerangan. Pertimbangan pada biaya merupakan faktor penyebab kendala tersebut. Sehingga hal ini yang perlu mendapat perhatian bagi aparat pemerintah desa saat membuat perencanaan. Maka untuk meminimalisir terjadinya *over cost*, penting melakukan analisis manfaat dari biaya yang dikeluarkan untuk melihat sejauh mana perencanaan yang dibuat apakah sejalan dengan dampak yang diperoleh khususnya pada peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Adapun penggunaan analisis manfaat atas nilai uang (*value for money*) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat sejauhmana aktivitas atau operasi pelaksanaan kegiatan pemerintah termasuk pemerintah desa yang sudah dicapai. Hal ini harus selaras dengan tujuan, visi, misi yang tertuang dalam strategi atau perencanaan pemerintah. Secara teori, *value for money* merupakan konsep yang terdapat pada manajemen organisasi yang memandang pada tiga aspek, yakni aspek ekonomi, aspek efektivitas, dan aspek efisiensi. Ketiga aspek ini digunakan untuk menilai kinerja organisasi. Tinambunan (2023) menyatakan bahwa manfaat pencapaian nilai uang adalah efisiensi pada penggunaan sumber daya, tercapainya tujuan dengan efektif, dan alokasi sumber daya secara ekonomi. Ketiga hal ini menjadi indikator untuk mengukur kinerja keuangan sebagai bentuk pengendalian manajemen pemerintahan (Yuliyanda, 2022).

Pada penelitian ini bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Tolotio merupakan salah satu yang menjadi kajian dari empat bidang yang dikelola oleh dana desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam mengukur kinerja keuangan dapat menggunakan analisis *value for money* yang mengukur pada aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran aspek ekonomis dilakukan melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan. Tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan dari rasio ekonomi.

Tabel 2. Rasio Ekonomi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Tolotio Tahun 2020-2022

Tahun	Rasio Ekonomi			Persentase (%)
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
2020	374.238.899,00	212.836.509,00	161.402.390,00	4.32
2021	427.288.500,00	373.007.500,00	54.281.000,00	12.70
2022	212.274.300,00	190.213.100,00	22.061.200,00	10.39

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada tabel di atas, tampak bahwa pengelolaan anggaran dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat mengalami fluktuasi penghematan ditinjau dari syarat kriteria ekonomis. Hal ini dapat dilihat pada sisa penggunaan anggaran yang disebabkan oleh banyaknya program kerja yang dilaksanakan tiap tahunnya.

Terlihat juga adanya penghematan anggaran yang cukup besar di tahun 2020 dan penghematan anggaran yang rendah di tahun 2022. Secara keseluruhan anggaran untuk program kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat terealisasi, meskipun pada beberapa program kegiatan tidak seluruhnya terealisasi maksimal untuk mencapai program kegiatan secara keseluruhan.

Pada aspek efisiensi menjelaskan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Dengan kata lain efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Tabel berikut memperlihatkan program pemberdayaan masyarakat Desa Tolotio didasarkan pada perhitungan rasio efisiensi :

Tabel 3. Rasio Efisiensi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Tolotio Tahun 2020-2022

Tahun	Rasio Efisiensi (%)		
	Input	Output	Efisiensi
2020	96.67	100,00	103.44
2021	77.00	100,00	129.87
2022	90,00	100,00	111,11

Sumber : Data Diolah

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi pada tabel di atas, tampak efisiensi atas program pemberdayaan masyarakat rata-rata di atas 100%. Tahun 2021 tingkat pencapaian efisiensi terbesar dan pencapaian output maksimum dari program kegiatan yang dilaksanakan. Penurunan prosentase di tahun 2020 dan 2022 disebabkan adanya penambahan program kegiatan. Selain itu yang turut berkontribusi pada penurunan karena beberapa program kegiatan yang tidak mencapai output 100%.

Selanjutnya aspek efektivitas yang menjelaskan hubungan antara output dengan tujuan atau rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Desa Tolotio dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Data berikut menunjukkan tingkat efektivitas program kegiatan dalam tiga tahun. Adapun pengukuran efektivitas sebagai ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4. Rasio Efektivitas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Tolotio Tahun 2020-2022

Tahun	Rasio Efektivitas (%)		
	Target	Capaian	Efektivitas
2020	100,00	100,00	100,00
2021	100,00	86,84	86,84
2022	100,00	83.50	83,50

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas secara rata-rata belum cukup memenuhi kategori efektif dari tahun 2020 sampai 2022. dimana pencapaiannya sebesar 90,11%. Capaian realisasi yang tidak sesuai ekspektasi luaran memberi indikasi bahwa program

kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat belum mencapai target. Idealnya semakin tinggi rasio efektivitas (100%), maka program kegiatan dinyatakan efektif. Menurunnya tingkat efektivitas disebabkan oleh faktor kurang tercapainya nilai fisik kegiatan dari target yang ditetapkan. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah penambahan program kegiatan tiap tahun yang berbeda dari program kegiatan sebelumnya.

Melihat pada hasil perhitungan analisis dari tiga pengukuran di atas, dapat dijelaskan bahwa dari aspek ekonomi, efektivitas dan efisiensi memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dari sisi ekonomis terlihat sisa anggaran yang menjadi ukuran penggunaan dana pada tiga tahun secara keseluruhan terselenggara dengan ekonomis. Tahun 2020 penghematan anggaran untuk program kegiatan sangat besar meskipun pada tahun ini sebanyak 11 kegiatan dilaksanakan dibanding tahun 2021 dan tahun 2022.

Dari aspek efektivitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan. Dalam mengukur tingkat efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut melainkan seberapa efektif dana desa yang disalurkan ke dalam program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat mencapai tujuannya. Untuk ini dapat dilihat dari rasio efektivitas yang memiliki nilai tinggi maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif.

Menilai program kegiatan selayaknya tidak hanya didasarkan pada nilai capaian yang dihasilkan. Melainkan perlu pula menyesuaikan dengan realita yang ditemukan di lapangan. Tentu tidak serta merta menyatakan bahwa capaian penilaian merupakan hal yang riil.

Karena penggunaan metode melalui angka tidak selalu mencerminkan dampak nyata atas program pemberdayaan di lapangan. Program pemberdayaan masyarakat sering dilaksanakan dalam konteks yang sangat kompleks seperti faktor budaya, geografi, dan kondisi ekonomi setempat akan mempengaruhi efektivitas program. Faktor lain yang turut mempengaruhi hasil program pemberdayaan di lapangan adalah pengaruh eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi, dan perubahan sosial. Kondisi seperti ini sulit diantisipasi akibat berbagai tantangan-tantangan yang tidak dapat diukur dalam penilaian berbasis angka.

Jika melihat pada data masyarakat di Desa Tolotio yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan, maka sejatinya program yang dibuat berdasarkan pada potensi desa. Adapun program kegiatan yang dilakukan di Desa Tolotio dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data yang diberikan ke kami hampir setiap tahun berganti program. Kecuali program pembuatan kolam ikan nila dan pemeliharaan udang vanname. Dalam pengamatan kami di lapangan pemeliharaan ikan nila belum berjalan maksimal demikian halnya dengan pemeliharaan udang vanname. Kurang maksimalnya penanganan pemeliharaan ikan dan udang disebabkan kurangnya sarana penyediaan air dan kualitas air akibat penguapan dan buangan air limbah, pengelolaan pakan, penebaran benih, dan monitoring penyakit. Permasalahan yang disebutkan ini akibat kurangnya pendampingan dalam penanganan pemeliharaan ikan sehingga program tidak sesuai tujuan yang diharapkan.

Lain sisi, program yang dilakukan cenderung berganti tiap tahun. Padahal kalau mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat, masyarakat diarahkan pada

penciptaan kemandirian, yang meliputi kemandirian berfikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki (Sulistiyani,2004). Posisi masyarakat bukan sebagai objek yang hanya menerima manfaat atau bergantung dari pemberian pihak luar (pemerintah, BUMN, dan pihak swasta), melainkan sebagai posisi subjek yang bertindak sebagai agen atau partisipan yang berbuat mandiri. Pada dasarnya pemerintah telah memberikan pelayanan kepada publik seperti kesehatan, Pendidikan, perumahan, transportasi, dan lain-lain, tetapi pemberian itu merupakan hal yang wajib yang negara harus berikan (*given*). Terciptanya kemandirian masyarakat membuka peluang terbukanya kapasitas serta ruang untuk mengembangkan potensi dan kreasi kemampuan mengontrol lingkungan dan sumber daya dan relasi sosial.

Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa usulan program kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dalam program pemberdayaan yang memadukan berbagai kegiatan yang diintegrasikan dengan kebijakan sosial. Meskipun tidak sepenuhnya dikatakan gagal, namun dapat dipastikan pemberdayaan masyarakat selain kurang berjalan efektif, juga tidak *sustainable* (berkelanjutan). Kurang efektifnya program kegiatan mengindikasikan program produktif pemberdayaan masyarakat tidak mengalami perubahan dari sisi peningkatan ekonomi.

Pada kondisi struktural tersebut, pemberdayaan masyarakat tidak hanya mendorong pada kekuatan mental individu akan tetapi dalam konteks yang lebih besar dimana alokasi kekuasaan akan terpengaruh pada realitas objektif (Mayer, 1985). Pandangan ini sejalan dengan pandangan yang dinyatakan Daman Huri (2003) bahwa setiap individu tidak bisa mengembangkan kemampuan dirinya karena dalam masyarakat terjadi pembagian kerja yang semu, relasi yang subordinatif dan ketimpangan sosial. Dengan demikian aktivitas program kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat desa terkait pengembangan kapasitas masyarakat hanya menghasilkan kegiatan yang terlihat bukan kegiatan sebenarnya, sehingga efisiensi program sebagaimana hasil dari analisis perhitungan rasio efisiensi menghasilkan inefisiensi pada kegiatan pemberdayaan. Jika program kegiatan diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat, maka seluruh kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan sebenarnya akan memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu dan bukan menyesuaikan keadaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan pada tiga aspek pengukuran value for money secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Rasio ekonomi pada rentang pengamatan cenderung mengalami peningkatan yang konsisten. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah desa Tolotio dalam penentuan anggaran memprioritaskan pada kegiatan yang dipandang penting dilakukan.

Dalam rentang pengamatan, hasil yang diperoleh pada rasio efisiensi hasil yang relatif efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan sumber daya yang dimiliki, pemerintah Desa Tolotio cukup mampu menggunakan dana yang rendah dalam menghasilkan kinerja keuangan bidang pemberdayaan masyarakat. Demikian halnya dengan hasil perhitungan rasio efektivitas cenderung fluktuatif dan termasuk pada kategori efektif. Hasil ini mengindikasikan bahwa tujuan alokasi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa Tolotio tercapai dengan baik.

Meskipun tiga aspek pengukuran menggunakan analisis *value for money* menunjukkan kinerja yang baik belum sepenuhnya dikatakan sempurna. Berbagai faktor yang turut berkontribusi pada program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sangat kompleks sehingga hasil yang diperoleh berdasar pada data yang hanya diukur berdasarkan pada angka belum tentu mencerminkan dampak nyata program pemberdayaan di lapangan. Pengalaman dan persepsi subjektif dari masyarakat yang terlibat baik individu maupun yang tergabung dalam kelompok pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya direpresentasikan pada hasil berupa angka. Sehingga penting menggunakan pendekatan yang holistik dalam mengvaluasi program pemberdayaan masyarakat desa sehingga akan diperoleh penilaian secara mendalam dan lengkap untuk memahami efektivitas serta keberhasilan program.

References:

- Chambers, Robert.1995. *Pembangunan Masyarakat Desa , Mulai Dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Daman Huri, Didins. S. 2003. *Paradoks Globalisasi dan Ketenagakerjaan*. dalam *Republika*.
- Fatimah, W. N. A. (2016). Karanganyar Hijau sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karanganyar (Karanganyar Hijau as Community Empowerment Program in Karanganyar Village). *Jurnal CARE*,1(1), 57-67.
- Kuswandro, W. E. (2016). Strategi pemberdayaan masyarakat desa berbasis partisipasi. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (November), 380-391
- Meyer, Robert. R. 1985. *Policy and Program Planning A Development*. Perspective New Jersey : Prentice Hall
- Prijono dan Pranarka, 2006. *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tinambunan, Siti May Sarah. 2023. Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Value For Money di Desa Sitio-Tio Hilir Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) , Volume 4, Nomor 1*
- Yuliyanda,Fanisah,A. N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep Value For Money pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. *Profjes , Volume 01 Edisi 02 .*